

## ANALISIS PETA RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KABUPATEN BADUNG (Studi Kasus di Tengah Pandemi Covid-19)

I Putu Gede Diatmika<sup>1\*</sup>, I Wayan Krisna Eka Putra<sup>2</sup>  
<sup>12</sup>Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali/Indonesia  
Penulis Korespondensi: [gede.diatmika@undiksha.ac.id](mailto:gede.diatmika@undiksha.ac.id)

| Article Info                                                                                                                          | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article History</b><br><i>Received: 13 November 2021</i><br><i>Revised: 28 November 2021</i><br><i>Published: 30 Desember 2021</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Keywords</b><br><i>Peta;</i><br><i>Risiko;</i><br><i>Keuangan;</i><br><i>Perkreditan;</i>                                          | Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada warga masyarakat desa karena LPD mengelola uang dari masing-masing Banjar yang ada di setiap Desa, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik untuk mendatangkan hasil yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk; Menginventarisasi system pengendalian internal yang sudah dilaksanakan atas setiap risiko; Merancang matrik/ model peta risiko dampak kemungkinan yang terjadi pada pengelolaan keuangan LPD di Kabupaten Badung; Menentukan penyebab kemungkinan terjadinya risiko pengelolaan keuangan LPD di Kabupaten Badung; dan menentukan strategi penanganan teridentifikasi untuk setiap risiko. Adapun luaran yang dijanjikan yaitu model peta risiko pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa sehingga akan terlihat posisi tiap- tiap risiko mana yang akan ditangani secara khusus dan mana yang cukup dipantau saja serta publikasi jurnal nasional bereputasi/ ber ISSN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan aktivitas di LPD hanya dipengaruhi oleh berkurangnya kegiatan menabung dan peminjaman kredit baru oleh masyarakat desa. Adapun keuntungan sebanyak 20 persen digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara 5 persen keuntungan bersih LPD digunakan untuk dana sosial. Artinya 25 persen dari total keuntungan LPD dikembalikan ke krama desa dan digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pada akhir 2019 laba LPD se-Bali tercatat senilai Rp.635 miliar, yang artinya ada dana senilai Rp.31 miliar berupa dana sosial LPD yang dapat digunakan untuk membantu warga desa yang terdampak Covid-19. Untuk peningkatan profitabilitas dalam menghasilkan laba maka kinerja manajemen keuangan LPD perlu dievaluasi kembali dan ditingkatkan. |

### PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dalam mengolah kekayaan dalam desa, yaitu dengan terciptanya sebuah Lembaga keuangan dalam desa adat. Landasan operasional LPD berpijak pada *awig-awig* desa adat yang mengedepankan ikatan kekeluargaan dan saling gotong royong antar warga desa adat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada warga masyarakat desa karena LPD mengelola uang dari masing-masing Banjar yang ada di setiap Desa, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik untuk mendatangkan hasil yang baik pula bagi Lembaga Perkreditan Desa, juga mendatangkan hasil yang baik pada desa adat. Pengelolaan LPD bukanlah pekerjaan yang mudah, ketika LPD mengalami kesalahan dalam pengelolaannya maka dapat berakibat fatal untuk keberlanjutannya dalam jangka Panjang. Salah satu upaya untuk mencegah hal tersebut adalah pemimpin beserta staf kepegawaian LPD harus mampu melihat kondisi dan perkembangan keuangan suatu Lembaga Perkreditan Desa.

Permasalahan yang ada pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan dibidang ekonomi adalah masalah pada

nasabah LPD mengalami peningkatan kredit macet, susahnya mencairkan deposito dan tabungan masyarakat adat, ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dalam membuat cadangan kerugian kredit yang di berikan dan pada LPD Kabupaten Badung belum ada payung hukum yang jelas untuk memilih standar akuntansi yang digunakan. Selain itu banyaknya persaingan dari lembaga keuangan lain yang masuk kepedesaan seperti Bank, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan BumDes. Lembaga keuangan tersebut memiliki strategi dan manajemen tersendiri dalam mengembangkan usahanya. Kredit macet menyebabkan sebuah LPD akan terancam bangkrut. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, LPD harus memiliki strategi dalam pengelolaan risiko yang baik dan memajukan sumber daya manusia (SDM).

Susilo dan Kaho (2010), dengan menerapkan manajemen risiko akan lebih baik dalam mengendalikan risiko, LPD dapat lebih mengeksplorasi dan mengeksploitasi peluang yang ada, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan, dapat meningkatkan reputasi LPD dan juga melindungi direksi dan pejabat lainnya dalam mengelola LPD. Selain manajemen risiko, penerapan GCG pada pengelolaan LPD juga sangat penting. Merebaknya Covid- 19 di berbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Badung Provinsi Bali sangat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas masyarakat termasuk Lembaga Perkreditan Desa tentu terdapat hambatan maupun kendala dalam pengelolaan keuangan sehingga upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan LPD dan pertanggungjawaban laporan pelaksanaan kegiatan serta menghindari risiko-risiko yang timbul dalam pengelolaan keuangan LPD di Kabupaten Badung maka dibutuhkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah, analisis dan finalisasi peta risiko perlu dilakukan agar diperoleh gambaran mengenai berbagai risiko dalam pengelolaan keuangan LPD.

### **Konsep Risiko**

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert risiko (2009) adalah *uncertainty about future event*, bahwa risiko merupakan ketidakpastian tentang peristiwa masa depan. Adapun Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (2000), mendefinisikan risiko pada 3 hal yaitu; (1) Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, yang mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan; (2) Variasi dalam keuntungan, penjualan atau variable keuangan lainnya dan (3) Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik dan masalah industry.

Terdapat berbagai teknik yang digunakan dalam praktik pengelolaan risiko, bergantung pada kompleksitas dan ukuran kegiatan dalam organisasi. Teknik bisa saja formal atau non formal, kuantitatif atau pertimbangan subyektif dan terintegrasi atau tersebar pada setiap unit usaha/pelaksana kegiatan atau terpusat. Jenis dan teknik pengelolaan LPD diantaranya adalah; (1) Risiko Kredit; (2) Risiko Likuiditas; (3) Risiko Operasional; (4) Risiko Pasar; (5) Risiko Hukum; (6) Risiko Strategik dan (7) Risiko Reputasi.

Manfaat manajemen peta risiko menurut (Fahmi 2013; 220), ada beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu; (1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan suatu ukuran dalam berbagai keputusan; (2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang; (3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian dalam organisasi; (4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum dan dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan/ organisasi telah membangun arah mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*).

### **Konsep Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan dimasa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, keluarga dan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi individu, keluarga, maupun perusahaan. Pengelolaan keuangan yang ketat dan berdisiplin memiliki pembukuan yang teratur. Pembukuan itu harus memuat catatan harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Hal-hal penting yang perlu ditekankan dalam pencatatan seperti jumlah hasil produksi, jumlah pembelian, pembayaran tunai, utang, catatan gaji, stok, peralatan, jumlah penjualan, penerimaan tunai dan asuransi (Kasmir, 2010).

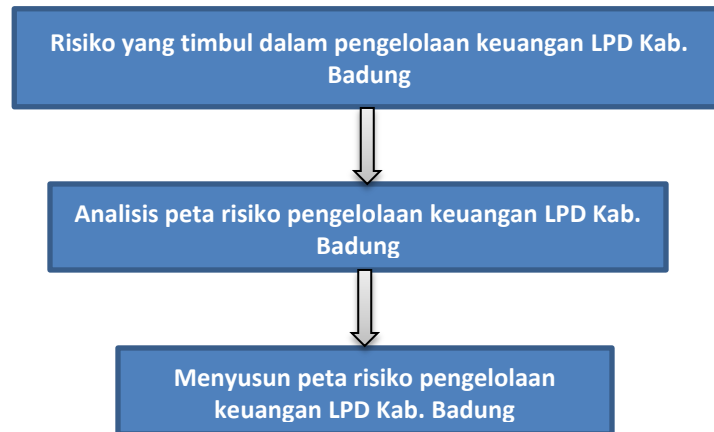
Secara umum tujuan dari pengelolaan keuangan meliputi; (1) Mencapai target dana tertentu dimasa yang akan datang; (2) Melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki; (3) Mengatur arus kas (pemasukan dan pengeluaran keuangan); (4) Melakukan manajemen resiko dan mengatur resiko dengan baik dan (5) Mengelola utang piutang (blogspot.com, 2015).

### **Konsep Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**

Darsana, (2010) menyatakan bahwa LPD merupakan salah satu aset dan sumber pendapatan desa adat sehingga memerlukan pengelolaan yang baik oleh pengurus dan badan pengawas. LPD memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada warga masyarakat desa karena LPD mengelola uang dari masing-masing Banjar yang terdapat di setiap desa, sehingga pengelolaaannya harus dengan cara yang baik dan tepat. Manajemen yang lemah sangat mempengaruhi risiko kredit yang ada dalam sebuah LPD seperti mengalami kredit macet. Kredit macet akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti kerugian yang dapat mengakibatkan tutupnya LPD tersebut (Narita Putri Dwi, 2016).

Nurjaya (2011), LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali yang oleh Peraturan Daerah (PERDA) diakui dan di kukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk usaha keuangan, dengan sifat yang bersifat khusus karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah Desa. Fungsi LPD didirikan sesuai PERDATINGkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 menyebutkan dalam pasal 3 bahwa; (1) LPD adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional sertaberfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya; (2) Pendayagunaan LPD

diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama desa untuk menunjang pembangunan. Selanjutnya sesuai dengan Perda tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 disebutkan dalam pasal 4 bahwa tujuan LPD didirikan adalah; (1) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal kerja yang efektif; (2) Memberantas ijon, gadai gelap dan semacamnya; (3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan; (4) Meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Applied Research* (penelitian terapan). Penelitian terapan memiliki tujuan untuk menemukan solusi atas suatu masalah yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat, atau organisasi industri/bisnis. Tujuan dari penelitian terapan adalah untuk meningkatkan kondisi manusia. Ini berfokus pada analisis dan memecahkan masalah sosial dan kehidupan nyata. Pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian terapan memiliki tujuan komersial spesifik dalam bentuk produk, prosedur atau layanan. Penelitian terapan adalah cara untuk mengetahui realitas dengan bukti ilmiah (Zoila Rosa Vargas Cordero, 2008). Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Evaluasi, yaitu untuk melakukan penilaian pada setiap tahapan yang dilakukan dalam penelitian, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil. Aksi, yaitu penelitian yang fokusnya pada tindakan sosial. Tujuannya ialah untuk mengembangkan kehidupan dan kondisi dari para subjek penelitian. Penilaian akan dampak sosial, yaitu membahas mengenai konsekuensi apa yang kira-kira akan muncul dari pembuatan rencana dan pilihan dari beberapa alternatif kebijakan. Waktu penelitian mulai dari bulan Mei hingga bulan Oktober 2021, adapun penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yaitu di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yaitu di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Alasan pemilihan lokasi adalah LPD di Kabupaten Badung mengalami peningkatan kredit macet, susahnya mencairkan deposito dan tabungan masyarakat adat,

ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dalam membuat cadangan kerugian kredit yang di berikan dan pada LPD Kabupaten Badung belum ada payung hukum yang jelas untuk memilih standar akuntansi yang digunakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun Moleong (2011) menjelaskan bahwa; Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk menggali informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat laporan perkembangan yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Data yang terkumpul pada penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga teknik analisisnya sesuai dengan yang dikemukakan Moleong (2011) yaitu; 1. Reduksi data; data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang sama, data kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan penyajian data; 2. Pada penyajian data, setelah data diorganisasikan kemudian data disajikan dalam uraian– uraian naratif yang disertai dengan bagan atau table untuk memperjelas data; 3. dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari ketiga komponen tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peta Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**

Berdasarkan data sebelum terjadinya pandemi Covid- 19, lembaga perkreditan desa (LPD) di tengah-tengah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata, namun mampu menghasilkan kinerja yang baik, tercatat total aset lembaga keuangan milik desa pakraman sebesar Rp18,47 triliun, naik 22,5 persen dari asset yang semula Rp16,06 triliun. Total aset itu dibukukan oleh sebanyak 1.433 unit LPD yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di seluruh Pulau Dewata (LPD Bali Tumbuh, 2018). Pertumbuhan tersebut membuktikan bahwa masyarakat sudah semakin percaya bahwa lembaga keuangan yang diatur oleh peraturan daerah dapat membantu segala kebutuhan masyarakat, baik untuk berinvestasi maupun untuk kebutuhan sehari- hari dan kebutuhan kegiatan keagamaan.

Tumbuhnya aset LPD ditopang oleh penyaluran kredit lembaga yang naik 18,2 persen menjadi Rp13,14 triliun, dari periode sama sebelumnya Rp11,12 triliun. Total nasabah LPD seluruh Bali sebanyak 429.693. Dana pihak ketiga yang dibukukan oleh LPD juga naik signifikan. Tabungan senilai Rp3,1 triliun, tumbuh 34,7 persen jika dibandingkan perkembangan tahun sebelumnya Rp2,3 triliun (LPD Bali Tumbuh, 2018). Adapun deposito meningkat 37,6 persen menjadi Rp1,58 triliun dari sebelumnya Rp1,15 triliun (LPD Bali Tumbuh, 2018).

Kinerja LPD semakin meningkat dan kuat. Hal ini disebabkan adanya dana penjaminan simpanan, dana perlindungan dan dana penyangga likuiditas. Keberadaan dana penjaminan simpanan dan penyangga likuiditas dapat membantu meningkatkan kinerja LPD yang memiliki

aset kecil. Dari total 1.270 LPD, masih ada 350 unit (27,56%) yang memiliki aset kurang dari Rp1 miliar, sedangkan aset Rp1 miliar-Rp5 miliar sebanyak 406 unit (31,97%). Adapun yang memiliki aset lebih dari Rp5 miliar sebanyak 49,47% atau 514 unit (LPD Bali Tumbuh, 2018). Keberadaan penyangga likuiditas memungkinkan LPD yang asetnya besar akan memberikan bantuan kepada LPD yang memiliki aset kecil dengan sepengetahuan dari bendesa adat atau pimpinan desa adat. Melalui metode ini akan terjadi transfer dana dari LPD yang over likuiditas ke LPD minim likuiditas. Secara umum ada sekitar 70 LPD yang asetnya lebih dari Rp50 miliar.

Total aset LPD di kabupaten Badung mencapai Rp5,9 triliun, Gianyar Rp3,6 triliun sedangkan Denpasar Rp1,9 triliun. Adapun aset LPD di Tabanan Rp1,4 triliun, Karangasem Rp1,2 triliun, Buleleng Rp1,9 triliun, Klungkung Rp743 miliar, Bangli Rp854 miliar, dan Jembrana Rp539 miliar (LPD Bali Tumbuh, 2018). Aset LPD di kabupaten Badung cukup besar, hal ini disebabkan LPD di kabupaten Badung yang terkonsentrasi di Badung selatan seperti Kuta, Kedonganan dan Pecatu. Kemampuan LPD di daerah pinggiran dibandingkan di kabupaten Badung sangat berbeda, di daerah pinggiran, masyarakat meminjam dana di LPD biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti odalan sehingga jumlah pinjamannya kecil dan tidak produktif. Berbeda dengan masyarakat di kabupaten Badung, kebanyakan peminjam dana digunakan untuk investasi dan nilainya juga cukup besar.

LPD memiliki sistem pengelolaan yang kental dengan hukum adat dan kearifan lokal di Bali (Rusmala M.D, *et al.* 2017). LPD Provinsi Bali mencatat total aset Lembaga keuangan milik desa mencapai Rp 21,7 triliun hingga akhir tahun 2019 total tersebut dibukukan oleh sebanyak 1.433 LPD yang tersebar di 9 Kabupaten (m.bisnis.com, 2019). Dengan ini terbukti bahwa keberadaan LPD memberikan kontribusi yang luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa adat, bahkan aset yang dimiliki LPD dapat mencapai hingga triliun. Berdasarkan data dari Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali hingga akhir tahun 2019, aset yang dikelola LPD se-Bali mencapai Rp 21,7 triliun. Data aset masing-masing kabupaten atau kota memiliki perbedaan jumlah yang disesuaikan dengan potensi masyarakat serta jumlah desa adat yang ada. Tabel 1. berikut menunjukkan data LPD Provinsi Bali tahun 2019 dengan total aset LPD per Kabupaten.

**Tabel 1. Data Aset LPD Per Kabupaten Tahun 2019**

| N  | Kabupaten  | Total Aset            |
|----|------------|-----------------------|
| 1. | Badung     | Rp. 7.200.000.000.000 |
| 2. | Gianyar    | Rp. 4.600.000.000.000 |
| 3. | Denpasar   | Rp. 2.200.000.000.000 |
| 4. | Buleleng   | Rp. 2.100.000.000.000 |
| 5. | Tabanan    | Rp. 1.600.000.000.000 |
| 6. | Karangasem | Rp. 1.400.000.000.000 |
| 7. | Bangli     | Rp. 968.000.000.000   |
| 8. | Klungkung  | Rp. 901.000.000.000   |



*Sumber: LPD Provinsi Bali, 2019.*

Berdasarkan data pada Tabel 1. terlihat bahwa kabupaten Badung memiliki asset yang paling besar. Kemampuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dapat dipengaruhi oleh kemampuan LPD dalam menghimpun dana pihak ketiga dan kemampuan LPD dalam menghasilkan laba. Pihak ketiga adalah sumber dana yang paling penting bagi lembaga keuangan, bahwasanya dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana lainnya, sehingga lembaga keuangan yang berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga memiliki kemampuan dalam menyalurkan kredit dan dapat meningkatkan pertumbuhan kredit (Kasmir, 2010). LPD kabupaten Badung mampu menghimpun dana dari pihak ketiga sehingga dapat meningkatkan jumlah kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat desa. Profitabilitas yang tinggi dapat disebabkan oleh tiga faktor yakni; *Pertama*, tingkat efisiensi LPD yang tinggi; *Kedua*, pertumbuhan tabungan dan deposito berjangka yang tinggi dan disertai pertumbuhan pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat desa; *Ketiga*, tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi. Pemberian pinjaman berdasarkan karakter dan pengawasan lokal sudah cukup efisien untuk menghindari kesalahan fatal dalam menilai kemungkinan pengembalian pinjaman (Arsyad, 2008).

#### **Peta Risiko Pengelolaan Keuangan LPD di Kabupaten Badung**

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap merosotnya perekonomian Bali. Menyikapi kebangkitan ekonomi ditengah pandemi tidaklah mudah. Melalui peran LPD dan dukungan seluruh komponen masyarakat, merupakan salah satu upaya yang dapat membangkitkan perekonomian. Dalam kondisi pandemi LPD telah mengambil peran, mulai dari keringanan bunga untuk krama, hingga bantuan sembako untuk krama yang terdampak Covid-19, juga membantu pengembangan perekonomian masyarakat desa adat, dengan dukungan terhadap pengembangan produk lokal Bali, hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan perputaran ekonomi di Desa. Berikut kutipan pernyataan Bapak I Ketut Widnyana selaku ketua LPD Desa Kertha Kabupaten Badung.

*“.....kami membantu memberikan modal dengan bunga yang relatif lebih rendah kepada pasar desa adat hingga krama yang memiliki industry online sehingga mampu tetap produktif.....”*

Demikaina pula kutipan pernyataan Bapak I.B Ketut Susrama selaku ketua LPD Desa Sandakan, Petang Kabupaten Badung, yang menyatakan bahwa.

*“.....benar bahwa kebijakan yang kami terapkan untuk membantu masyarakat dimasa pandemi covid-19 ini, kami memberikan bantuan modal dengan bunga yang cukup rendah dengan tujuan agar mereka mampu dan tetap menjalankan usahanya, terutama yang memiliki industry online.....”*

Ribuan LPD yang ada turut merasakan dampak pandemi Covid- 19. Data per Mei 2020 terdapat 1. 435 LPD dengan karyawan 8. 134 orang, dengan nilai asset Rp. 24,3 triliun, deposito 11 triliun dan kredit 16, 2 triliun. Berikut profil LPD Badung.

**Tabel 2. Profil LPD Kabupaten Badung**

| No            | Nilai Aset        | Jumlah     | Proporsi     |
|---------------|-------------------|------------|--------------|
| 1             | > Rp 100 M        | 13         | 11%          |
| 2             | Rp 5 M – Rp 100 M | 63         | 52%          |
| 3             | Rp 1 – Rp 5 M     | 37         | 30 %         |
| 4             | >Rp 1 M           | 9          | 7 %          |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>122</b> | <b>100 %</b> |

*Sumber: Data Primer diolah*

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya himpitan ekonomi masyarakat provinsi Bali, juga melemahkan perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia, serta mengakibatkan LPD mengalami kontraksi keuangan yang sangat signifikan dan berpengaruh pada melemahnya kinerja likuiditas keuangan LPD. Pada kondisi dilanda pandemi Covid-19, upaya yang dilakukan LPD sehingga dapat bertahan dengan melakukan kegiatan, diantaranya solusi melalui kebijakan relaksasi kredit dari LPD dengan persetujuan desa adat untuk krama/warga peminjam karena sangat diharapkan oleh krama serta menurunkan bunga tabungan dan deposito.

Menyikapi masa pandemi Covid-19 dengan kondisi serta situasi perkembangan LPD terkait likuiditas dan mengingat kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, maka untuk mengantisipasi aset likuid yang berdampak pada resiko likuiditas LPD, untuk itu dilakukan Bimtek, seperti Bimtek penanganan likuiditas, mitigasi dan solusi ditengah pandemi Covid-19, sebagai pilot project karena kondisi yang kurang bagus di masa pandemi sehingga melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengurus Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) dalam rangka menyikapi likuiditas masing-masing LPD. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan LPD yang saat ini berada pada posisi up normal sehingga dibutuhkan penguatan pada SDM manajemen likuiditas dengan harapan LPD Badung menjadi kuat dan dapat bertahan di masa pandemi Covid-19. Perkembangan LPD secara umum, semua aset mengalami penurunan dan dana pihak ketiga juga mengalami penurunan di masing-masing kecamatan. Untuk itu melalui kegiatan Bimtek penanganan likuiditas, mitigasi dan solusi ditengah pandemi Covid-19 diharapkan antara pengurus di masing-masing desa adat untuk bersinergi dengan prajurunya, dengan membekali ilmu-ilmu tentang likuiditas sehingga antara pihak pengelola dengan pemilik yakni desa adat memiliki pemahaman terkait manajemen likuiditas.

Lebih lanjut SekDes Desa Panji menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan Karang Taruna desa Panji diantaranya, turut serta dalam membangun infrastruktur desa, memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olah raga, ketrampilan, keagamaan dan kesenian, mengakomodasi segala bentuk kegiatan kepemudaan untuk membentuk karakter pemuda yang tangguh trampil dan bertanggungjawab, memberikan warna tersendiri dalam mendukung kegiatan pembangunan khususnya pembinaan generasi muda, dengan potensi sumber daya manusia yang memadai dan dukungan dari



pemerintah desa, Karang Taruna banyak berperan dalam kiprah pembangunan desa. Melalui pemanfaatan dana desa, selain turut serta dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa Panji, kaum muda Karang Taruna juga terlibat dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan pembangunan, juga turut dalam proses evaluasi, sehingga dapat diketahui sejauh mana proses pembangunan telah terlaksana, dengan tujuan untuk merancang pembangunan tahap berikutnya. Kaum muda Karang Taruna memiliki sikap idealisme dan daya kritis yang kuat, artinya generasi muda dapat menimbulkan kreatifitas dan dinamika dalam tatanan berupa perubahan, pembaruan dan menyempurnakan kekurangan yang ada dalam proses pembangunan desa Panji Kabupaten Buleleng. Meski pada dasarnya LPD di Badung masih cukup kuat. Kondisi LPD tidak ada hal-hal yang sangat berisiko. Sehingga dengan program Bimtek penanganan likuiditas, mitigasi dan solusi ditengah pandemi Covid-19 guna mempersiapkan diri melalui manajemen likuiditas yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kekuatan melalui peningkatan SDM. Dari 122 LPD di Kabupaten Badung pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 7,6 triliun. Tahun 2020 ini mengalami penurunan menjadi Rp 7,4 triliun atau terjadi penurunan Rp 200 miliar lebih.

**Table 3. Nilai Aset LPD Kabupaten Badung**

| Kecamatan    | Nilai Aset (Kekayaan) LPD di Kabupaten |                   |               |          | Jumlah     |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|----------|------------|
|              | > Rp 100 M                             | Rp 5 M – Rp 100 M | Rp 1 – Rp 5 M | >Rp 1 M  |            |
| Kuta         | 7                                      | 2                 | 0             | 0        | 9          |
| Kuta         | 3                                      | 2                 | 0             | 0        | 5          |
| Kuta Utara   | 3                                      | 6                 | 0             | 0        | 9          |
| Mengwi       | 0                                      | 24                | 14            | 0        | 38         |
| Abiansemal   | 0                                      | 24                | 9             | 0        | 33         |
| Petang       | 0                                      | 5                 | 14            | 9        | 28         |
| <b>Total</b> | <b>13</b>                              | <b>63</b>         | <b>37</b>     | <b>9</b> | <b>122</b> |

Sumber: Buku Profil Kabupaten Badung

Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat memang memberi pengaruh juga terhadap lembaga keuangan termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun dengan dukungan semua pihak terutama masyarakat adat, LPD masih tetap bertumbuh dan optimis melangkah. Berikut kutipan pernyataan Bapak Nyoman Cendikiawan selaku ketua BKS LPD Provinsi Bali.

*“.....kondisi LPD saat pandemi ini memang menyebabkan LPD mengalami penurunan, namun karena kekompakan LPD dan saling menguatkan satu sama lain, semua permasalahan di tahun 2020 lalu dapat diatasi dan dilewati dengan baik meski terdapat beberapa koreksi dan evaluasi, LPD akan terus melakukan upaya pembenahan diri dari berbagai aspek seperti penguatan pada manajemen likuiditas dan penguatan teknologi digital, karena LPD merupakan sumber ekonomi yang dimiliki desa adat, desa adat harus diperkuat melalui konsep ekonomi, dengan ekonomi yang kuat maka desa adat juga akan semakin kuat.....”*

Sebanyak 1.436 LPD yang ada di Bali yang menampung kurang lebih 8.000 tenaga kerja selama pandemi Covid-19 belum terjadi PHK terhadap pegawai. Hal ini menunjukkan bentuk

komitmen LPD di tengah masa sulit untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Konsep Tri Hita Karana yang dilakukan LPD dan sesuai dengan koridor rencana kerja sehingga terjalin suasana kondusif di desa adat dan kerja sama semua pihak mulai dari pemerintah, pengurus dan pengawas LPD serta masyarakat desa adat yang ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan LPD. LPD juga selalu mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi digital, dengan istilah berteknologi barat namun berjiwa timur. Berpikir secara global namun aksi tetap lokal. Kepercayaan masyarakat terhadap LPD menjadikan eksistensi LPD selalu terjaga meski dimasa sulit seperti masa pandemi Covid-19 saat ini. Sugiarti, Luh P (2020) menyatakan bahwa masyarakat di kabupaten Badung dapat bernafas lega, meskipun di tengah kekhawatiran pandemi Covid-19 dan tidak bekerja, akan tetapi kebutuhan pokok tetap terjamin oleh bantuan LPD. Sesuai aturan desa adat, pendayagunaan LPD diarahkan kepada usaha peningkatan tarap hidup krama (masyarakat) desa untuk menunjang pembangunan, di tengah pandemi Covid-19 pertumbuhan LPD masih relatif stabil. Pada Maret 2020 terjadi peningkatan senilai 0,68 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Perekonomian masyarakat desa relatif stabil, dengan kehidupan yang lebih sederhana dibandingkan masyarakat kota, yang menyebabkan penggunaan uang menjadi lebih terbatas (Sugiarti, Luh P, 2020)

## KESIMPULAN

Masyarakat desa yang menandatangani uang di LPD lebih banyak dari kalangan petani, hal ini dilakukan setelah masa panen dan kehidupan sehari-hari petani tidak bergantung pada dana hasil panen, sehingga deposito di LPD masih stabil. Pada kondisi normal sebelum Covid- 19, masyarakat desa akan menarik uang deposito atau tabungan untuk upacara keagamaan dan pernikahan. Namun dimasa pandemi kegiatan keagamaan dan pernikahan diminimalisir, sehingga masyarakat tidak harus menarik tabungan atau deposito di LPD. Selain minimnya penarikan tabungan, pembayaran bunga dan angsuran kredit di LPD juga tetap berjalan. Hanya aktivitas menabung yang menjadi berkurang disebabkan masyarakat desa memilih menyimpan uang tunai sebagai upaya untuk berjaga-jaga ditengah pandemi Covid- 19. Begitu juga dengan aktivitas meminjam kredit juga berkurang, disebabkan adanya pembatasan aktivitas atau kegiatan masyarakat dimasa pandemi seperti pelarangan kegiatan upacara keagamaan dan pernikahan sehingga masyarakat tidak harus mengambil atau meminjam dana di LPD. Penurunan aktivitas di LPD hanya dipengaruhi oleh berkurangnya kegiatan menabung dan peminjaman kredit baru oleh masyarakat desa. Adapun keuntungan sebanyak 20 persen digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara 5 persen keuntungan bersih LPD digunakan untuk dana sosial. Artinya 25 persen dari total keuntungan LPD dikembalikan ke krama desa dan digunakan untuk penanganan pandemi Covid- 19. Pada akhir 2019 laba LPD se-Bali tercatat senilai Rp.635 miliar, yang artinya ada dana senilai Rp.31 miliar berupa dana sosial LPD yang dapat digunakan untuk membantu warga desa yang terdampak Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

Aset Lembaga Perkreditan Desa Bali Tumbuh. (2018). Diakses di:

<https://kabar24.bisnis.com/read/20180207/78/735888/aset-lembaga-perkreditan-desa-bali-tumbuh-225>

- Darsana, Ida Bagus. (2010). Peranan dan Kedudukan LPD Dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *Kertha Wicaksana*.
- Fahmi, Ilham. (2013). *Kewirausahaan Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung : Alfabeta.
- Griffin, Rizky W dan Ronald J, Ebert. (2009). *Business, 8<sup>th</sup> Edition*, Pearson International Edition, New Jersey, Prentice Hall.
- Joel. G. Siegel dan Jae. K. Shim. (2000). *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-XXIX, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 6
- Narita, Dwi Putri. (2016). *Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu Sidemen Karangasem Tahun 2015*
- Nurjaya, I Nyoman. (2011). *Landasan Teoritik Pengaturan LPD*. Denpasar: Udayana University Press.
- Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia. (2021). *Pelatihan Pengelolaan Keuangan, Bank Indonesia*. Diakses di: <http://manajemensplendidus.blogspot.com/2015/07/>
- Susilo, Leo J dan Kaho, Victor Riwu. (2010). *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000: Untuk Industri Nonperbankan*. Buku Risk Management. ISBN: 979-442-27
- Sugiarti Luh Putu. (2020). LPD Jadi Tumpuan Masyarakat Badung saat Pandemi Corona. Diakses di: <https://bali.bisnis.com/read/20200504/537/1235979/lpd-jadi-tumpuan-masyarakat-badung-saat-pandemi-corona>
- Zoila Rosa Vargas Cordero. (2008). *Penelitian Terapan*. Diakses di: <https://sites.google.com/site/investigacionaplicada2020/investigacion-aplicada/a-denificacion>